



PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16/DPRD/2020

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar urutan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
  - b. bahwa agar pembentukan peraturan daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah, diperlukan perencanaan program pembentukan peraturan daerah;
  - c. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, disusun dengan mempertimbangkan jumlah dan bobot serta meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyusunan peraturan daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
8. Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 100).
- 9.

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 180/2637/HK-B tanggal 6 Oktober 2020 Perihal : Daftar Usulan Program Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2021;
  2. Surat Badan Pembentukan PERDA DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 13/BAPEMPERDA/XI/2020 tanggal 10 November 2020 Hal : Propemperda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021;

-3-

3. Hasil Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke- 42 Masa Persidangan I Tahun 2020 Tanggal 20 November 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 sebanyak 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:  
1. 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Usul Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
2. 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah yang Merupakan Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah di maksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 20 November 2020  
WAKIL KETUA DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd,

PRABASA ANANTATUR

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021  
Nomor : 16/DPRD/2020  
Tanggal : 20 November 2020

**RAPERDA USULAN INISIATIF DPRD**

No	Judul Raperda	Status		Pengusul	Keterangan
		Baru	Perubahan		
1	2	3	4	5	6

1.	Pengelolaan Jasa Lingkungan	<b>Baru</b>		Badan Pembentukan PERDA DPRD Provinsi Kalimantan Barat.	Usulan Lanjutan
2.	Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	<b>Baru</b>		Badan Pembentukan PERDA DPRD Provinsi Kalimantan Barat.	Usulan Baru
3.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	<b>Baru</b>		Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Barat.	Usulan Baru

**RAPERDA USULAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No	Judul Raperda	Status		Pengusul	Keterangan
		Baru	Perubahan		
1	2	3	4	5	
1.	Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	<b>Baru</b>		Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Lanjutan
2.	Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal	<b>Baru</b>		Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru
3.	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah		<b>Perubahan</b>	Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Perubahan
4.	Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pramuwisata		<b>Perubahan</b>	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Perubahan
5.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020	<b>Baru</b>		Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Usulan Baru

-2-

No	Judul Raperda	Status		Pengusul	Keterangan
		Baru	Perubahan		
1	2	3	4	5	6
6.	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021	<b>Baru</b>		Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset	Usulan Baru

				Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	
7.	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	<b>Baru</b>		Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Kalimantan Barat.	Usulan Baru
8.	Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal		<b>Perubahan</b>	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat.	Usulan Perubahan
9.	Tambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	<b>Baru</b>		Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru
10.	Perubahan Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pertambangan dan Mineral		<b>Perubahan</b>	Dinas Energi dan sumberdaya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Perubahan

WAKIL KETUA DPRD  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Ttd,

PRABASA ANANTATUR